BUMN BERINTEGRITAS

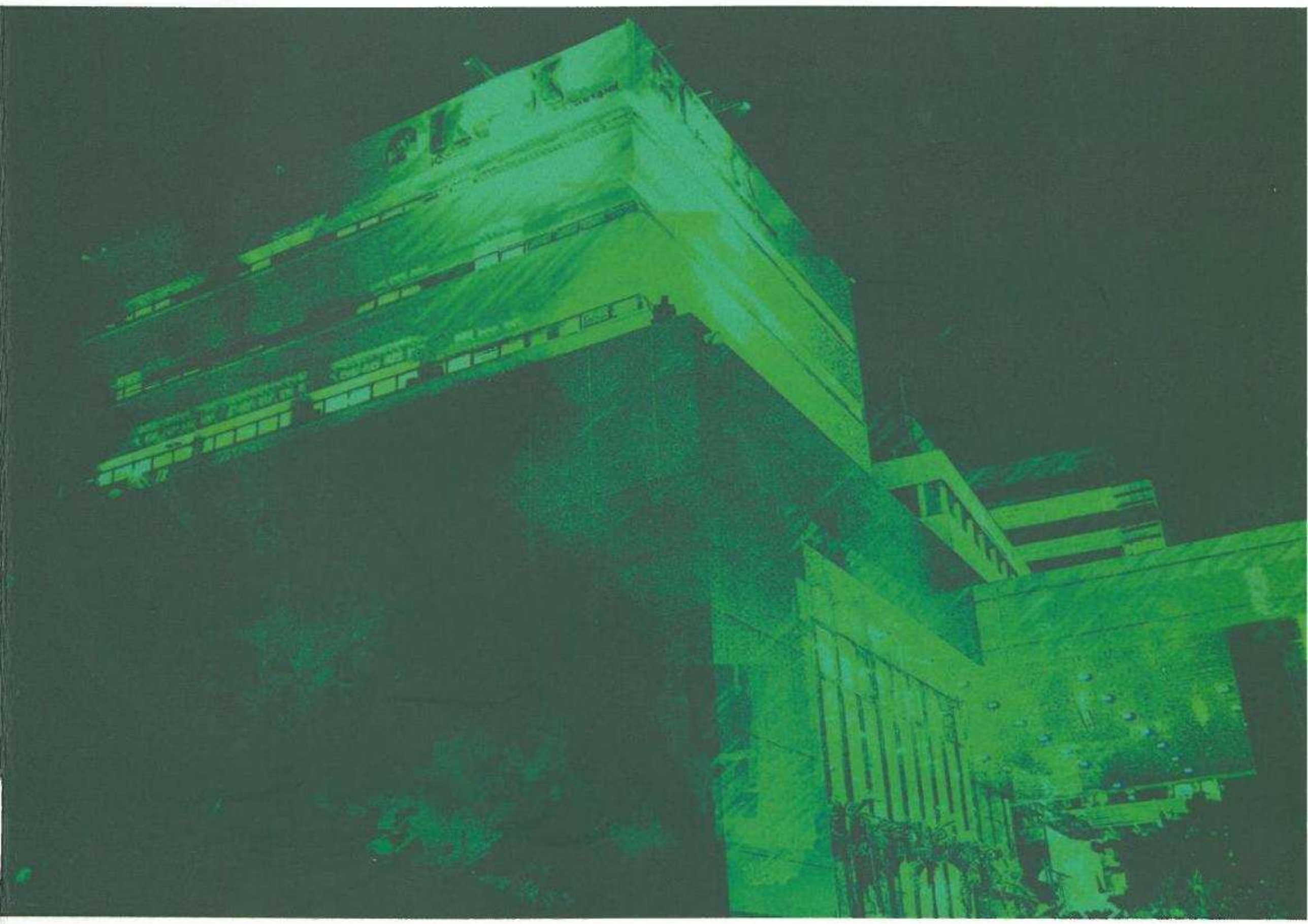

PROGRAM PENCEGAHAN KPK

KPK's Prevention Tool Kit

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BUMN

PENANAMAN INTEGRITAS & MENTALITAS BEKERJA

PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

PENCIPTAAN MOTOR PERUBAHAN

KOMITMEN

BANGUN PEGAWAI BERINTEGRITAS

LINGKUNGAN KERJA KONDUSIF

KEBIJAKAN
SISTEM
KETELADANAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Promoting Institutional Integrity

Adopted from: Component of Integrity: Data and Benchmark of Tracking Trend in the Government, Paper by OECD, May 2009

INTEGRITY SYSTEM

2 LAYER

Recruitment & promotion policy;
Performance measurement;
HRD policy and system;
Procurement and contracting which aim for value for money;

Complementary:
The aim is not to build integrity, but has secondary effect on integrity

1 LAYER

Code of conduct;
Conflict of interest rule;
Financial disclosure;
Gift & gratuity policy;
Post employment measure;
Reporting channel &whistleblower;
Internal integrity training;
External evaluations of integrity;
Disclosure integrity issue;

INSTRUMENTS
PROCESSES
STRUCTURES

Core:
The main aim is to build integrity

Integritas pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang bersifat otonom yang berbasis pada sistem dan moral

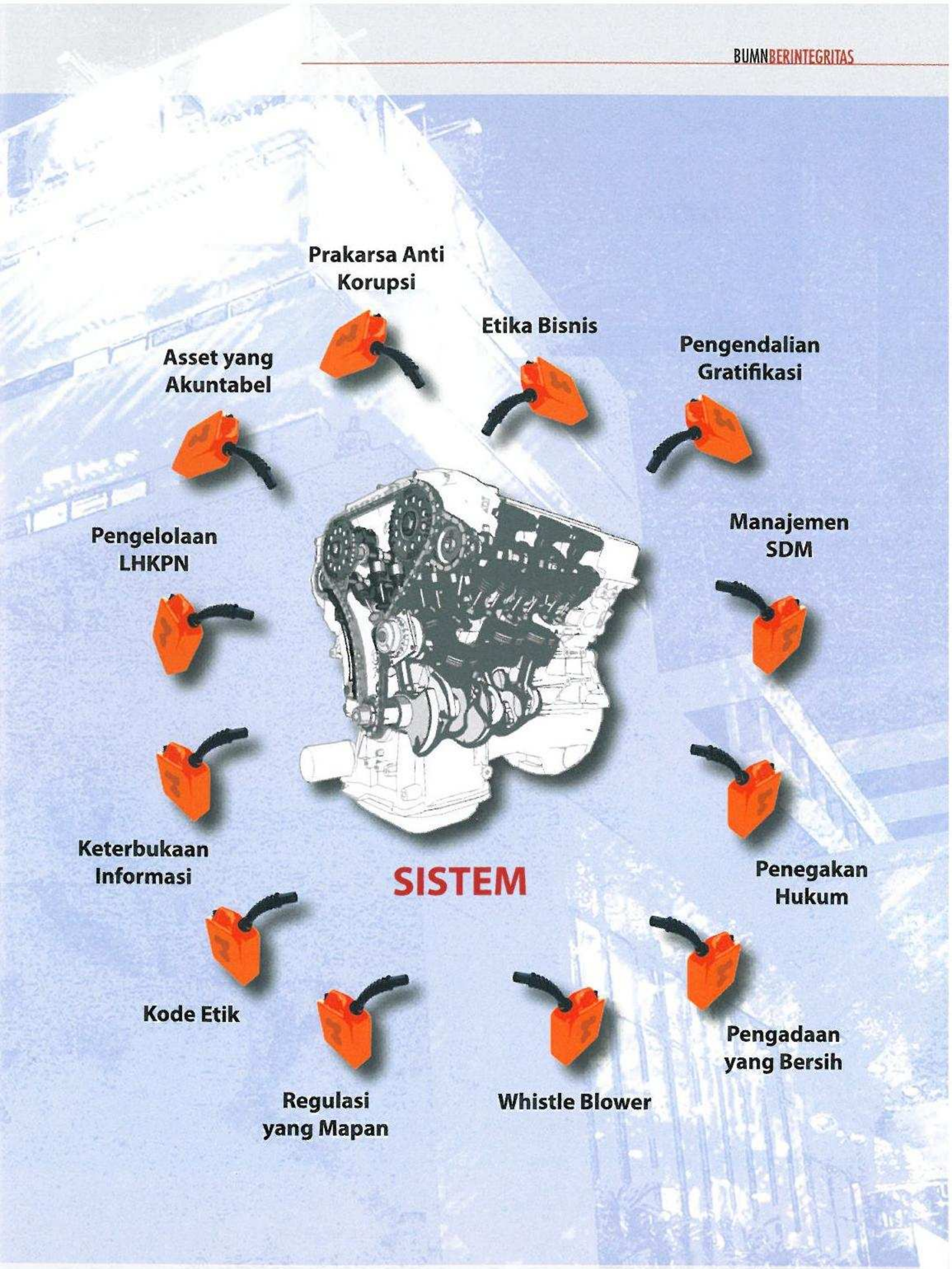
Prakarsa Anti Korupsi
Etika Bisnis
Asset yang Akuntabel
Pengendalian Gratifikasi
Pengelolaan LHKPN
Manajemen SDM
Keterbukaan Informasi
SISTEM
Penegakan Hukum
Kode Etik
Pengadaan yang Bersih
Regulasi yang Mapan
Whistle Blower

Program Pengendalian Gratifikasi

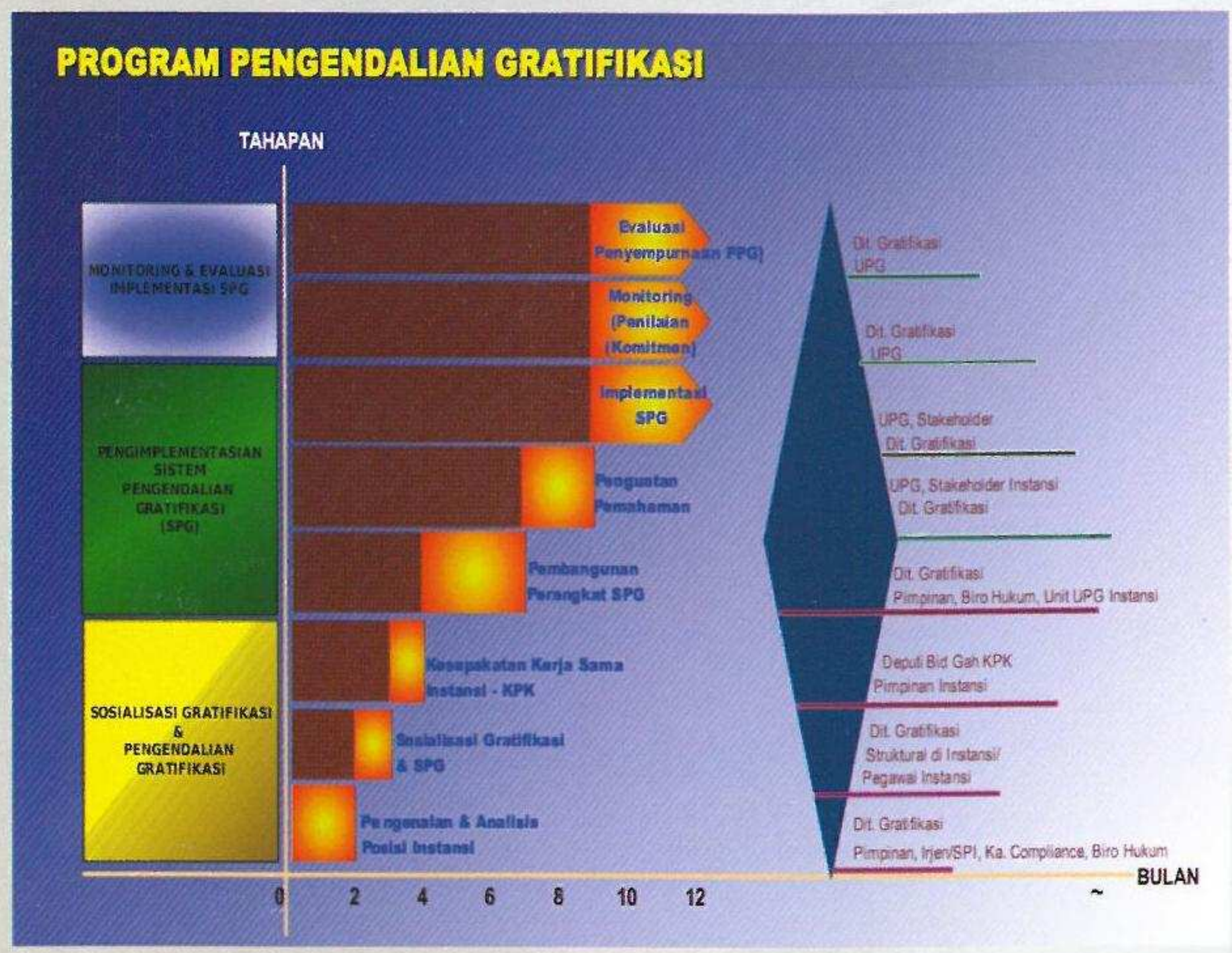

Manfaat PPG Untuk Instansi

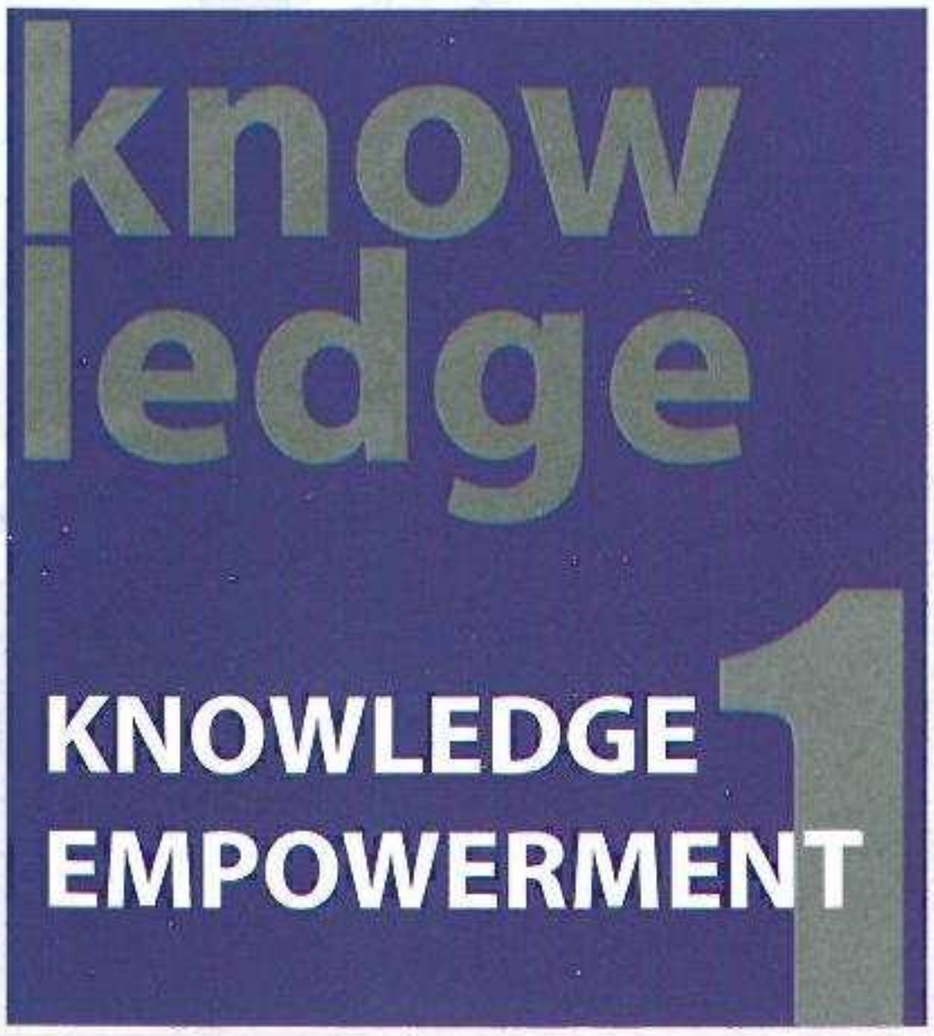

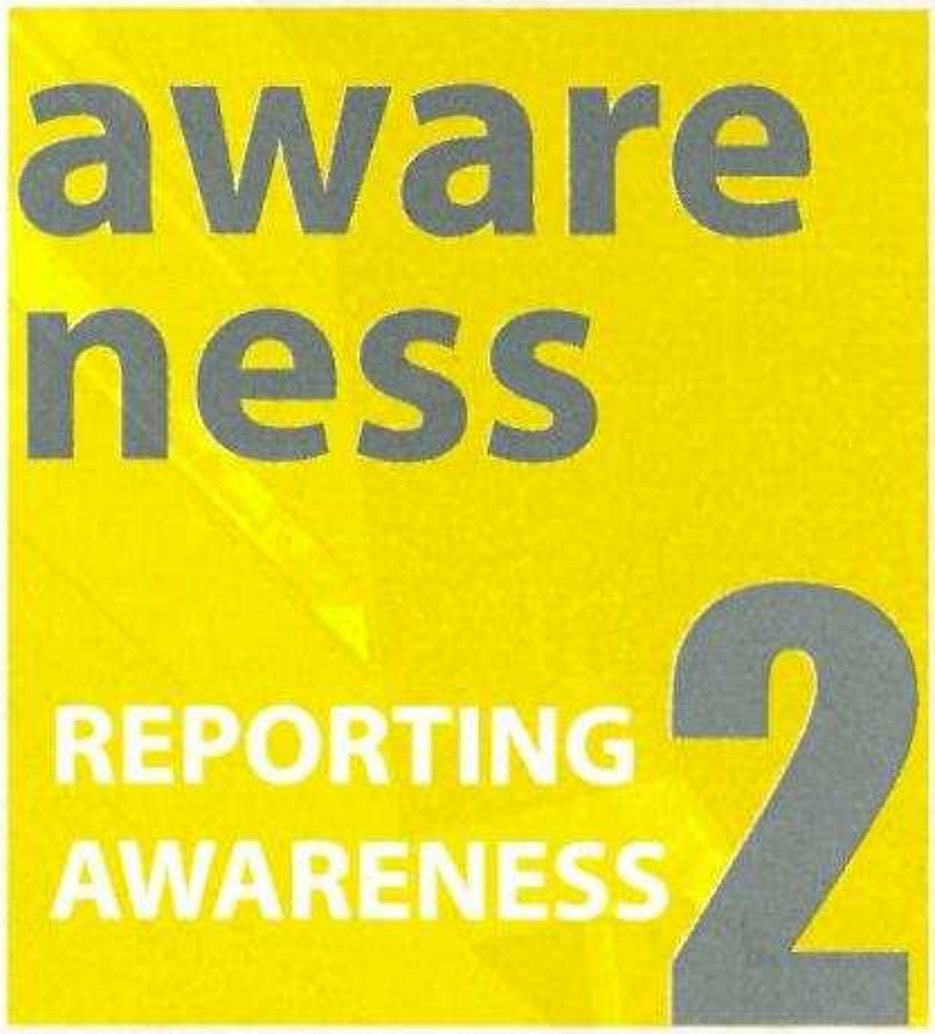

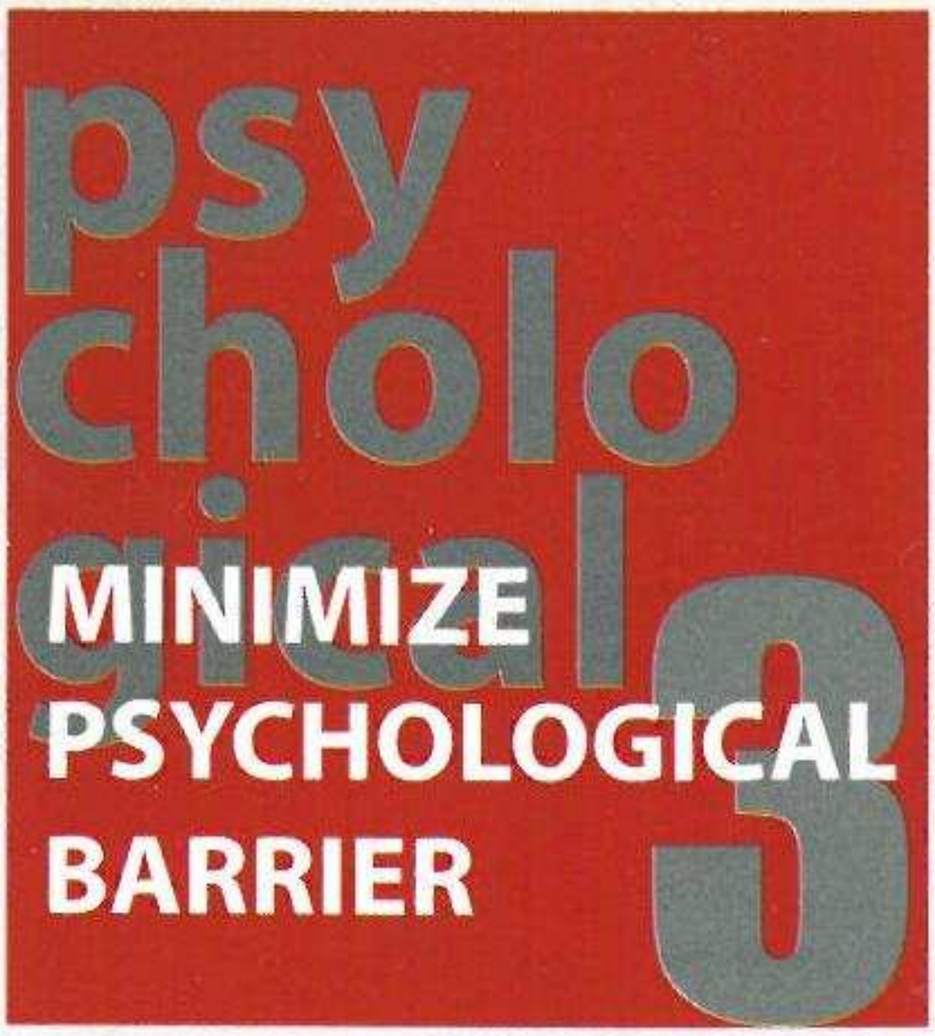

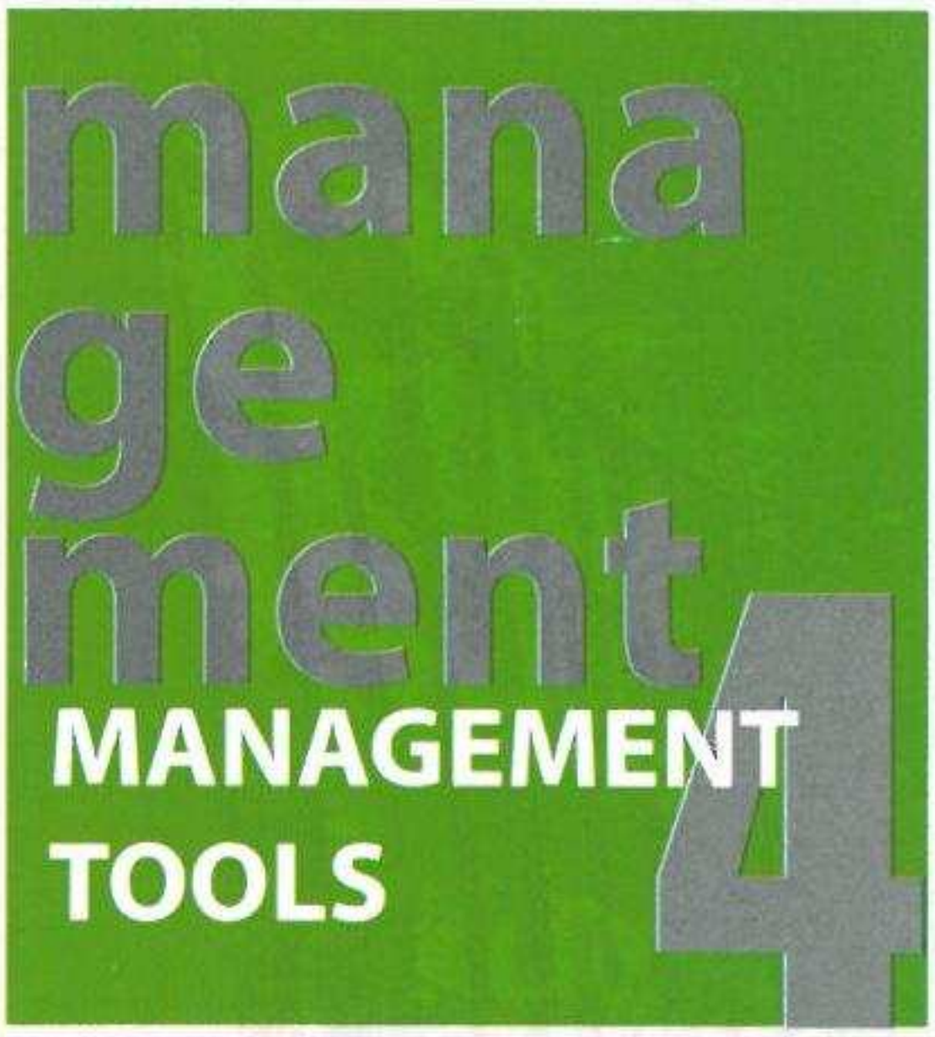

Cultural Change

Manfaat LHKPN

Pendeteksian dini dalam pencegahan korupsi

Jujur, Terbuka & Tanggung Jawab

Penyediaan sarana kontrol masyarakat

Data Base HRD

1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan LHKPN

2 Memenuhi Kebutuhan Manajemen Dalam Rangka Pencegahan Korupsi

3 Edukasi Sejak Dini Manfaat Pelaporan LHKPN

Mengapa Perlu Pengelolaan LHKPN?

1 *Background check* sebelum diangkat ke jabatan yang lebih tinggi

2 Mengembangkan *Corporate Culture*

3 *Management Tools* pengembangan SDM

4 *Knowledge Empowerment* tentang LHKPN

Sistem ini merupakan sarana bagi whistleblowers untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah maupun akan terjadi, yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka

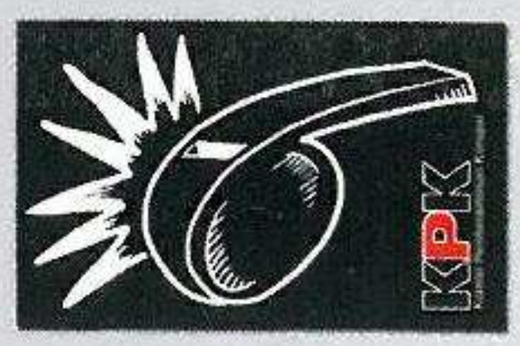

WHISTLEBLOWER'S SYSTEM

Apakah yang akan dilakukan KPK untuk menjamin keamanan Anda sebagai pelapor?

Undang undang dengan jelas telah mengamanatkan kepada KPK untuk melindungi setiap pelapor, dan selama ini KPK telah melaksanakan amanat tersebut secara profesional dan konsisten. KPK melakukannya karena sadar betapa pentingnya peran serta Anda dalam pemberantasan korupsi

Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaporan ini?

Apabila Anda ingin mengirimkan pengaduan, cari lokasi untuk mengakses situs KPK Whistleblower's system melalui **www.kpk.go.id**, di tempat-tempat yang Anda rasa aman, nyaman serta kemungkinan kecil diketahui pihak lain yang Anda tidak inginkan. Klik pada tombol "Kirim Pengaduan" yang terdapat pada kiri atas dari halaman informasi

Proses pengaduan terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu:

1. Berkaitan dengan keinginan Anda untuk mengungkapkan atau tidak identitas Anda. Secara default sistem dibuat untuk tidak mengungkapkan identitas Anda untuk melindungi kerahasiaan Anda, kecuali Anda menginginkan identitas Anda ditampilkan, dapat mengisi isian identitas pelapor)

2. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi Judul dari pengaduan Anda

3. Kemudian pada halaman pengaduan, agar dijelaskan dengan bahasa Anda sendiri mengenai kasus yang dilaporkan, dan isian pertanyaan-pertanyaan terkait kasus yang dilaporkan. Untuk teknis lebih detil dapat mengikuti petunjuk didalam situs

4. Anda dapat terus berkomunikasi dengan KPK dan memantau perkembangan pengaduan Anda dengan membuat Kotak Komunikasi rahasia, yang memerlukan user ID dan password. Status perkembangan dari pengaduan akan Anda terima melalui Kotak rahasia tersebut. Bila Anda telah memiliki Kotak komunikasi rahasia tersebut, Anda dapat mengaksesnya dengan menekan tombol "Login"

Sepanjang Anda tidak mengisi data yang mengarah pada pengungkapan identitas Anda, sistem akan melindungi status "Anonim" Anda. KPK akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai Whistleblower, KPK hanya fokus pada kasus yang dilaporkan

WHISTLEBLOWER'S SYSTEM

Program Pencegahan KPK

KPK's Prevention Tool Kit

PERLUASAN WAJIB LHKPN

Program ini merupakan peran serta aktif BUMN dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kewajaran perolehan harta kekayaan pegawai melalui perluasan kewajiban pelaporan LHKPN untuk mengedukasi sejak dini manfaat pelaporan LHKPN dan memenuhi kebutuhan manajemen dalam rangka pencegahan korupsi.

Mengapa perlu perluasan LHKPN?

1. Mengembangkan corporate culture
2. Manajemen tools pengembangan SDM
3. Knowledge empowerment tentang LHKPN
4. Background check

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)

Serangkaian kegiatan dengan peran aktif BUMN untuk menciptakan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMN dengan memperkuat perangkat aturan, SDM, organisasi, penyebarluasan pemahaman terkait gratifikasi dan penanganan pelaporan gratifikasi.

Apa yang diperoleh dari Penerapan PPG?

1. Control Evironment
2. Knowledge Empowerment
3. Reporting Awareness
4. Management tools
5. Minimize Psycological Barrier

PROGRAM INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK) DAN STUDI PRAKARSA ANTI KORUPSI (SPAK) BUMN

Deskripsi Program

PIAK adalah alat ukur untuk menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi.

Hal yang diukur: Kombinasi penilaian kuantitatif dan kualitatif.

Penilaian mencakup aspek: pengembangan integritas, pengembangan transparansi, pengembangan sistem pengaduan dan kegiatan antikorupsi

Manfaat Program

Mendorong instansi pemerintah untuk berperan aktif dalam pengembangan sistem antikorupsi di instansinya.

Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) BUMN

Deskripsi Program

SPAK adalah alat ukur untuk menilai kemajuan prakarsa antikorupsi di BUMN.

Hal yang diukur: Kombinasi penilaian kuantitatif dan kualitatif.

Penilaian mencakup aspek: pengembangan integritas, pengembangan transparansi, pengembangan sistem pengaduan dan kegiatan antikorupsi

Manfaat Program
Mendorong BUMN untuk berperan aktif dalam pengembangan sistem antikorupsi di lembaganya

PROGRAM ETIKA BISNIS BERINTEGRITAS
Program khusus KPK untuk private sector dengan pendekatan "i-Learning" (*impact, integrated, interactive, inspiring*), agar aspek supply terjadinya korupsi, semakin berkurang. Program bertujuan untuk memfasilitasi pegawai agar memiliki integritas dan menjadi motor pengerak lingkungan berintegritas sesuai dengan lingkaran pengaruhnya.
Manfaat Bagi Individu BUMN
Setelah mengikuti program pembelajaran diharapkan peserta mampu:
1. Memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang berintegritas
2. Memiliki kiat-kiat akselerasi pembentukkan lingkungan berintegritas
3. Menguasai teknik membangun integritas pribadi dan sistem dengan pendekatan sub-conscious programing
4. Menyusun rencana aksi penerapan zona integritas dan sistem pengendaliannya

Manfaat Bagi BUMN
Dengan terbentuknya para motor penggerak etika bisnis berintegritas, Organisasi / Perusahaan akan memiliki *Sustainability Competitive Advantage* (SCA) atau keunggulan bersaing secara berkelanjutan, serta memiliki keselarasan antara pribadi, sistem dan lingkungan perusahaan.

PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BUMN/D)
Deskripsi Program
Serangkaian kegiatan pencegahan KPK yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian Negara akibat pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BUMN/D yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara: Koordinasi, Monitoring dan Supervisi
Manfaat Bagi Instansi
- Pengelolaan barang menjadi akuntabel
- Komunikasi antar instansi lancar
- Masalah BMN mendapatkan solusi
- Menambah nilai perusahaan

KPK WHISTLE BLOWER SYSTEM (KwS)
Sistem ini merupakan sarana bagi whistleblowers untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah maupun akan terjadi, yang melibatkan aparat penegak hukum,penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka.
Peran Serta Aktif dalam Melawan Korupsi
Peran aktif anda sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Jika anda mengetahui adanya dugaan korupsi yang merupakan wewenang KPK, segera laporkan kepada KPK.
Sistem ini memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, menyediakan fasilitas kotak komunikasi yang bisa diakses menggunakan nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui pelapor. Karena itu, tunggu apalagi? Sekarang saat yang tepat untuk ambil bagian dalam upaya menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran yang diakibatkan oleh korupsi

PROGRAM PENCEGAHAN KPK

KPK's Prevention Tool Kit

Contact Person:

Kedeputian Pencegahan KPK
Ady Ruwadi (021) 2557 8440
Budi Santoso (021) 2557 8445

Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta
Selatan 12920
Telp. (021) 2557 8300
Faks. (021) 5289 2448
www.kpk.go.id